



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2022

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian Ranwal RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Simpang Empat, Maret 2021

K e p a l a



dr.Hj. ANNA RAHMADIA

NIP. 19820927 200805 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. 1. Latar Belakang	I-1
1. 2. Landasan hukum	I-2
1. 3. Maksud dan Tujuan	I-5
1. 4. Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	II-1
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A.....	II-1
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II-4
2. 3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-6
2. 4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	III-3
3. 3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. M. Natsir – Simpang Ampek Telp. (0753) 7464100 / Fax.(0753) 7464105
Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ /DPPKBP3A/VIII/2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 050/82/DPPKBP3A/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Nomor 900/20/DP2KB-PASBAR/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2021;
- (2) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 19820927 200805 2 001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SOPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja DPPKBP3A Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Renja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan

dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Surat Edaran Empat Menteri : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE - 33/MK.02/2012, Nomor 050/4379/SJ dan Nomor SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DPPKBP3A serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
- b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
- c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang,*
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum,*
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 *Maksud dan Tujuan,*
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan,*
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,* Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,* memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) ; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPPKBP3A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran

strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKBP3A tahun 2020 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2020, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 9 Program dan 18 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2020.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBP3A tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja DPPKBP3A tahun 2020 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBP3A pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 dan gaji 14 yang dibayarkan pada PNS lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat yang dianggarkan sebesar Rp. 5.135.709.308,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.159.828.606,- atau sebesar 81%.

b. Anggaran Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat, yang pada TA. 2020 dianggarkan sebesar Rp 5.666.781.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.557.961.607- atau sebesar 80%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A

tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKBP3A tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama mendukung pencapaian **Misi ke 1** yaitu **Mewujudkan Pasaman Barat Bermatahat dengan Pola Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovatif** dengan memfokuskan pada tujuan 1 yaitu Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, akuntabel dan inovatif, untuk mencapai sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta **Misi ke 2** yaitu **Mewujudkan Pasaman Barat Maju dan Sejahtera** dengan Pola Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memfokuskan pada tujuan 3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan yang inklusif untuk mencapai sasaran 5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan sasaran 6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat selanjutnya Pola **Misi 4 Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing** dengan memfokuskan pada Tujuan 4. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pendapatan dengan 2 (dua) indikator utama, yakni:

- 1) Rata-rata lama sekolah perempuan ditargetkan mencapai 8 pada tahun 2026.
- 2) Laju pertumbuhan Penduduk yang ditargetkan mencapai 1,9 pada tahun 2026.

DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- 2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DPPKBP3A Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2020 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya serta masih tingginya kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Meningkatnya pengendalian kuantitas penduduk melalui kebutuhan dan memperluas pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Sejahtera
- 2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG)
- 3) Meningkatkan integrasi perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan kebijakan pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang, Forum OPD maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga serta pelayanan KB MKJP sebagaimana terdapat pada table berikut:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada 7 agenda Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-3 (2016-2021) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2014-2019 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
II	Nasional		
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	RKP 2020	
2.	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	RKP 2020	
3.	Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	RKP 2020	
4.	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	RKP 2020	
5.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	RKP 2020	
III	Provinsi		
1.	Pembangunan Agama dan Budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2.	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4.	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	

5.	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	
----	---	-------------------------	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPPKBP3A Tahun 2020 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja DPPPKBP3A Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Predikat Pencapaian KLA
2.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan Kepesertaan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	1.Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPPKBP3A	1. Predikat APE 2. Nilai SAKIP 3. Level Maturitas SPIP 4. Opini Terhadap Laporan Keuangan

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan urusan wajib dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum, rencana program dan kegiatan DPPKBP3A Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan, seperti terlihat pada tabel T-C.33 berikut:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke-2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih focus mendukung pencapaian tujuan Strategis DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 4 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala DPPKBP3A, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 Program (Teknis dan Rutin), 22 Kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKBP3A Tahun 2021 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 12.253.885.521 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sebagaimana disajikan pada table 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada table dibawah ini:

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Maret 2021
Kepala DPPKBP3A

Dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 19820927 200805 2 001

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Pasaman Barat

DINAS PENGEN : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1 12 01 01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1 12 01 02	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Unit)	119	88	119	119	100	119	119	100
1 12 01 03	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1 12 02 01	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun (Paket)	6	0	0	0	-	0	4	67
1 12 02 02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	Jumlah pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin(Unit)	153	0	2	0	-	2	148	97
1 12 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1 12 03 01	Pengadaan Pakaian Aparatur	Jumlah pengadaan pakaian aparatur (Stel)	346	0	0	0	-	0	0	-

1	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1	12	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat (Orang)	40	10	10	0	-	10	40	100
1	12	05	04	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	-	0	0	-
				Program Daerah Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Score KLA	700	Pratama	Pratama (500-600)	Pratama	100	Pratama (500-600)	600	86
1	12	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	7	24	7	14,89	47,01	3,5	10	70
					Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	4	20,4	4	6,84	58,48	6,5	8	50
1	12	15	07	Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Persentase Forum Anak Aktif	65	58,06	65	58,06	89	75	100	154
1	12	15	08	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Nilai Capaian Kelembagaan	100	122	100	122	122	95	122	122
					Nilai Capaian Kluster I	100	110	100	110	110	90	110	110
					Nilai Capaian Kluster II	140	150	140	150	107	125	150	107
					Nilai Capaian Kluster III	140	130	140	130	93	120	130	93
					Nilai Capaian Kluster IV	70	100	70	100	143	90	100	143
					Nilai Capaian Kluster V	150	145	150	145	97	125	145	97
1	12	15	06	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Pada Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi tentang GN AKSA	1850	550	550	550	100	550	750	41
1	12	16	02	Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Jumlah Pengurus yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Korban	250	50	50	50	100	50	250	100
					Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100	100	100	100	100	100	100	100
1	12	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta Sosialisasi KDRT	350	0	-	0	-	-	300	86
				Program Daerah Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,95	2,18	1,98	2,18	90,83	1,95	2	103
				Program Keluarga Berencana	Unmet Need	20%	15,60%	20%	15,60%	128,21	19,50%	19%	97

					CPR	57%	68,01%	57,00%	66,00%	116	57,93%	68,50%	120
					TFR (Total Fertility Rate)	2,72	NA	2,72%	3,05%	89	2,64%	NA	
					ASFR (15-19)	35	NA	35	NA	NA	34	NA	
1	12	15	01	Pelayanan KIE	Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Pelayanan MKJP	0	0	0	0	-	0	0	-
1	12	15	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah Peserta Sosialisasi Kesehatan Reproduksi	0	0	0	0	-	0	0	-
1	12	15	04	Pembinaan Kelompok KB	Jumlah Kelompok KB yang dibina	38	0	0	0	-	0	0	-
1	12	15	08	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen data dan informasi keluarga (Dokumen)	4	1	1	1	100	1	4	100
1	12	15	09	Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS (DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (Unit)	1671	450	450	63	14	450	1142	68
1	12	15	11	Jambore keluarga berencana	Jumlah Penghargaan yang didapatkan (Penghargaan)	24	0	5	0	-	5	5	21
1	12	15	12	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah Kampung KB yang di bina	19	24	19	24	126	19	24	126
					Jumlah Faskes yang Mendapatkan Distribusi Alkon	30	30	30	22	73	30	30	100
1	12	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja, Toma dan Toga Yang Mendapatkan KIE (Orang)	1320	330	330	330	100	330	990	75
					Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	0	1	0		1	1	100
1	12	15	13	Peningkatan SDM Penyuluh KB dan Kader KB	Jumlah Penyuluh, Tenaga Kesehatan KB dan Kader KB yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan SDM	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	-
1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Aktif	57%	68,01%	57,00%	68,01%	119	57,93%	69%	120
1	12	17	01	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Peserta KB Baru	16.950	10.891	10.891	13.684	126	10.891	5.269	31
1	12	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89,95%	92,26%	89,95%	92,59%	103	89,95%	90,00%	100
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	87,50%	93,38%	87,50%	93,18%	106	87,50%	90,00%	103
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	87,50%	93,51%	87,50%	95,99%	110	87,50%	90,00%	103
					Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	88,45%	95,63%	88,45%	95,99%	109	88,45%	90,00%	102
1	12	23	01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pelatihan	1166	88	88	88	100	88	264	23
1	12	23	02	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	60	12	12	12	100	12	36	60
				Program Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat APE	2 (madya)	0	1 (Pratama)	0	-	1 (Pratama)	1 (Pratama)	100
1	12	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	56,20%	27,85%	56,20%	45,46%	81	56,20%	54,20%	96

1	12	17	09	Pelatihan Bagi Pekerja Wanita Industri Rumah Tangga	Jumlah Pekerja Wanita yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	250	50	50	10	50	50	200	80
1	12	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	10,0%	10,0%	10,0%	7,5%	100	10,0%	7,5%	75
					Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan dilembaga Eksekutif (Jumlah Perempuan Eselon II, III,IV per Total Pejabat Struktural)	45%	75,40%	45%	75,40%	168	45%	41%	91
1	12	18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	900	300	300	300	100	300	900	100
1	12	18	04	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Perempuan yang mendapat Bimbingan Manajemen dalam mengelola Usaha	120		0		-	0	0	-
1	12	18	05	pendidikan dan pelatihan Politik Bagi Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Politik	50	0	0	0	-	0	0	-
1	12	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) (Besaran ARG OPD per Belanja Langsung)	0,13%	1,80%	0,13%	4,63%	3.562	0,13%	4,63%	3.562
1	12	16	05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (Orang)	214	107	107	107	100	107	214	100
1	12	16	06	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak	3	1	2	1	50	2	3	100

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPKBP3A				Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2017	2018	2019	2020	
1	Unmet Need			21,00%	20,50%	20,00%	19,50%	26,34%	21,07%	17,51%	15,60%	15,60%	
2	CPR			56,00%	56,81%	57,00%	57,93%	55,88%	62,36%	67,62%	68,01%	66,00%	
3	TFR (Total Fertility Rate)			3,00	2,81	2,72	2,64	NA	NA	NA	NA	3,05	
4	ASFR (15-19)			37,00	36,00	35,00	34,00	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Persentase Peserta KB Aktif			56,00%	56,81%	57,00%	57,93%	55,88%	62,36%	67,62%	68,01%	66,00%	
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB			89,80%	89,85%	89,90%	89,95%	82,93%	84,77%	84,77%	92,26%	93,18%	
8	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB			88,30%	88,35%	88,40%	88,45%	92,39%	76,22%	84,70%	95,63%	95,99%	
9	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) (Besaran ARG OPD per Belanja Langsung)			0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,03%	0,03%	0,03%	1,80%	4,63%	
10	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif			2,50%	10,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	2,50%	10,00%	7,50%	
11	Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan dilembaga Eksekutif (Jumlah Perempuan Eselon II, III,IV per Total Pejabat Struktural)			41,00%	43,00%	45,00%	47,00%	49,17%	39,67%	39,67%	75,40%	75,50%	
12	Rasio Kekerasan Terhadap Anak			4,00	3,80	3,70	3,60	3,00	5,30	11,40	24,00	14,89	
13	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan			8,00	7,50	7,00	6,50	2,00	8,40	3,31	20,40	6,84	

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	BELANJA				12.849.313.319	BELANJA				12.849.313.319	
	Belanja Tidak Langsung				5.743.280.319	Belanja Tidak Langsung				5.743.280.319	
	Gaji	DPPKBP3A	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai	14 Bulan	3.668.962.319	Gaji	DPPKBP3A	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai	14 Bulan	3.668.962.319	
	TPP	DPPKBP3A	Terpenuhinya TPPPegawai	14 Bulan	2.074.318.000	TPP	DPPKBP3A	Terpenuhinya TPPPegawai	14 Bulan	2.074.318.000	
	Belanja Langsung				7.106.033.000	Belanja Langsung				7.106.033.000	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	943.093.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	943.093.000	
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKBP3A	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	518.093.000	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKBP3A	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	518.093.000	
2	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	DPPKBP3A	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Unit)	119	250.000.000	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	DPPKBP3A	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Unit)	119	250.000.000	
3	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100%	175.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100%	175.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	535.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	535.000.000	
1	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	DPPKBP3A	Jumlah Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	2 Paket	450.000.000	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	DPPKBP3A	Jumlah Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	2 Paket	450.000.000	

2	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	DPPKBP3A	Jumlah pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin(Unit)	8	85.000.000	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	DPPKBP3A	Jumlah pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin(Unit)	8	85.000.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional		52.940.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional		52.940.000	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat (Orang)	10	52.940.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat (Orang)	10	52.940.000	
IV	Program keluarga berencana		Unmet Need	19,5%	4.500.000.000	Program keluarga berencana		Unmet Need	19,5%	4.500.000.000	
			CPR	57,00%				CPR	57,00%		
			TFR (Total Fertility Rate)	2,64%				TFR (Total Fertility Rate)	2,64%		
			ASFR (15-19)	35				ASFR (15-19)	35		
1	Pendataan Keluarga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen data dan informasi keluarga (Dokumen)	1	125.000.000	Pendataan Keluarga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Dokumen data dan informasi keluarga (Dokumen)	1	125.000.000	
2	Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (Unit)	450	1.400.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (Unit)	450	1.400.000.000	
3	Jambore keluarga berencana	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penghargaan yang didapatkan (Penghargaan)	5	125.000.000	Jambore keluarga berencana	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Penghargaan yang didapatkan (Penghargaan)	5	125.000.000	
4	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi pada Balai Penyuluh KB	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kampung KB yang di bina (Kampung KB)	19	2.700.000.000	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi pada Balai Penyuluh KB	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kampung KB yang di bina (Kampung KB)	19	2.700.000.000	
			Jumlah Faskes yang Mendapatkan Distribusi Alkon (Faskes)	30				Jumlah Faskes yang Mendapatkan Distribusi Alkon (Faskes)	30		
5	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Remaja, Toma dan Toga Yang Mendapatkan KIE (Orang)	330	150.000.000	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Remaja, Toma dan Toga Yang Mendapatkan KIE (Orang)	330	150.000.000	

			Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	-			Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	-	
V	Program pelayanan kontrasepsi		Persentase Peserta KB Aktif	57,93%	275.000.000	Program pelayanan kontrasepsi		Persentase Peserta KB Aktif	57,93%	275.000.000	
1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kab.Pasaman Barat	Peserta KB Baru (Akseptor)	17.000	275.000.000	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kab.Pasaman Barat	Peserta KB Baru (Akseptor)	17.000	275.000.000	
VI	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89,95%	75.000.000	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89,95%	75.000.000	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	87,50%				Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	87,50%		
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	87,50%				Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	87,50%		
			Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	88,45%				Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	88,45%		
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	88	75.000.000	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	88	75.000.000	
VII	Program penguatan kelembagaan PUG dan anak		Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) (Besaran ARG OPD per Belanja Langsung)	0,13%	185.000.000	Program penguatan kelembagaan PUG dan anak		Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) (Besaran ARG OPD per Belanja Langsung)	0,13%	185.000.000	
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (Orang)	107	125.000.000	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (Orang)	107	125.000.000	
2	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Kab.Pasaman Barat	Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak (Buku)	2	60.000.000	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Kab.Pasaman Barat	Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak (Buku)	2	60.000.000	

VIII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	10%	175.000.000	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	10%	175.000.000	
			Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan dilembaga Eksekutif (Jumlah Perempuan Eselon II, III,IV per Total Pejabat Struktural)	47%				Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan dilembaga Eksekutif (Jumlah Perempuan Eselon II, III,IV per Total Pejabat Struktural)	47%		
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan (Orang)	300	175.000.000	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan (Orang)	300	175.000.000	
2	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Perempuan yang mendapat Bimbingan Manajemen dalam mengelola Usaha	100	-	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Perempuan yang mendapat Bimbingan Manajemen dalam mengelola Usaha	100	-	
IX	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3,5	315.000.000	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3,5	315.000.000	
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	6,5				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	6,5		
1	Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Persentase Forum Anak Aktif	75	75.000.000	Forum Anak dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Dalam dan Luar Kab.Pasaman Barat	Persentase Forum Anak Aktif	75	75.000.000	
2	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab.Pasaman Barat	Nilai Capaian Kelembagaan	800	100.000.000	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab.Pasaman Barat	Nilai Capaian Kelembagaan	800	100.000.000	
			Nilai Capaian Kluster I	850				Nilai Capaian Kluster I	850		

			Nilai Capaian Kluster II	850				Nilai Capaian Kluster II	850		
			Nilai Capaian Kluster III	850				Nilai Capaian Kluster III	850		
			Nilai Capaian Kluster IV	850				Nilai Capaian Kluster IV	850		
			Nilai Capaian Kluster V	850				Nilai Capaian Kluster V	850		
3	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Pada Anak	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi tentang GN AKSA (Orang)	550	50.000.000	Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Pada Anak	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi tentang GN AKSA (Orang)	550	50.000.000	
4	Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengurus yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Korban (orang)	50	90.000.000	Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pengurus yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Korban (orang)	50	90.000.000	
			Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100				Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100		
X	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Partispasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	56,20%	50.000.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Partispasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	56,20%	50.000.000	
1	Pelatihan Bagi Pekerja Wanita Industri Rumah Tangga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pekerja Wanita yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	100	50.000.000	Pelatihan Bagi Pekerja Wanita Industri Rumah Tangga	Kab.Pasaman Barat	Jumlah Pekerja Wanita yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	100	50.000.000	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu hamil dan Keluarga	Desa Baru Kec. Ranah Batahan	Terlaksananya Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga	1 Kegiatan	
2	Pelayanan KB MKJP	Jorong Pigogah Patibubur Kec. Sungai Beremas	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	1 Kegiatan	

2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penerangan dan Instalasi Listrik Penunjang Operasional Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	10.000.000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	16.727.744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	30.000.000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	32.061.500
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi, dan Map DPPKBP3A yang Dibutuhkan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	15.000.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali 12 Bulan	100 %	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	200.000.000
2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12.000.000				200.000.000	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Elektronik Penunjang Operasional Kantor dan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100.000.000
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Pembangunan Gudang dan Parkir Kendaraan Dinas	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100.000.000
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60.000.000				85.000.000	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Listrik dan Air untuk Operasional Kantor	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	85.000.000
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							152.000.000				234.905.000	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang akan dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak/KIR	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	67 Unit	100 %	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	169.905.000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Alat Elektronik Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Unit	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	45.000.000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	20.000.000
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							78.522.151				125.000.000	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							52.490.551				75.000.000	

2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Unmet Need/CPR/TFR (Total Fertility Rate)/ASFR (Age Specific Fertility Rate)15 - 19	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah - Sekolah	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Peserta Sosialisasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/58/3/34 %	150 Orang	150 Orang	52.490.551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Unmet Need/CPR/TFR (Total Fertility Rate)/ASFR (Age Specific Fertility Rate)15 - 19	20/58/3/34 %	75.000.000	
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									26.031.600					50.000.000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Unmet Need/CPR/TFR (Total Fertility Rate)/ASFR (Age Specific Fertility Rate)15 - 19	Jumlah Laporan Data Program Bangga Kencana	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/58/3/34 %	12 Dokumen	12 Dokumen	26.031.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Unmet Need/CPR/TFR (Total Fertility Rate)/ASFR (Age Specific Fertility Rate)15 - 19	20/58/3/34 %	50.000.000	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									2.937.392.399					3.900.673.000
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									975.818.000					975.818.000
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Peserta KB Aktif	Tersedianya Media KIE dan Dukungan Manajemen BOKB	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	11 Balai Penyuluh KB	11 Balai Penyuluh KB	168.242.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	168.242.000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Peserta KB Aktif	Tersedianya Operasional Balai Penyuluh KB	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	11 Balai Penyuluh KB	11 Balai Penyuluh KB	807.576.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	807.576.000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									91.200.000					91.200.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Peserta KB Aktif	Tersedianya Operasional Pembinaan Program Kbbagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan/Atau Sub PPKBD)	Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	19 Nagari	19 Nagari	91.200.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	91.200.000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									1.168.630.399					2.025.911.000
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB Aktif	Terdistribusinya alokont dan visitasi dan registrasi faskes	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	25 Faskes	25 Faskes	55.075.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	55.075.000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif	Terlaksananya Pergerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOP dan MOW)	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	IUD-MPLANT (2.805), MOP (15) MOW (80)	25 Faskes	648.178.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	648.178.000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB Aktif	Terlaksananya Rehabilitasi Gudang Alkont dan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Rehabilitasi Gudang Alkont dan Balai Penyuluh KB	Kecamatan Pasaman, Sungai Aur, Koto Balingka, Ranah Batahan	58 %	5 Paket	5 Paket	465.377.399	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	1.322.658.000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan									701.744.000					807.744.000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peserta KB Aktif	Terlaksananya kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	144.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes	11 Kecamatan	250.000.000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Peserta KB Aktif	Terlaksananya Integrasi Program Bangga Kencana di Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 %	24 Kampung KB	11 Kecamatan	557.744.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Persentase Peserta KB Aktif	58 %	557.744.000	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									1.774.400.000					987.400.000
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									1.774.400.000					987.400.000

2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Jumlah Kelompok Tribina yang Dibentuk dan Mendapatkan Pembinaan di Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.95 %	5 Kelompok	11 Kecamatan	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89.95 %	100.000.000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Jumlah Pengadaan BKB KIT Stunting Jumlah Pengadaan KIT Siap Nikah Anti Stunting	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.95 %	25 Unit 10 Unit	11 Kecamatan	1.115.000.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89.95 %	280.000.000
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Tersedianya operasional penanganan stunting	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Nagari	11 Kecamatan	607.400.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Tersedianya operasional penanganan stunting	10 Nagari	607.400.000
					TOTAL							12.402.873.793						12.940.343.142

Simpang Empat, Maret 2021
Kepala

dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 198209272008052001

	seharusnya	pagu	selisih
gaji ptt	100.750.000,00		
gaji thl	331.500.000,00		
	432.250.000,00	656.679.000	224.429.000,00
rutin	380.127.744	380.127.744	-
Prioritas+organisasi	950.784.567	950.784.567	-

4.711.792.399	
	294.849.474,00
531.891.500	5.006.641.873,00
4.474.750.373	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	
Operasional Balai Penyuluh KB (BOKB)	
Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh kader (PPKBD dan/Atau Sub	
Distribusi Alkont (BOKB), Biaya Operasional visitasi dan registrasi faskes	
Biaya Penggerakan Pelayanan KB (BOKB)	
Obgyn, IUD Kit, Implant, Rehabilitasi Gudang, Kendaraan Bermotor, Paket Penguatan infrastruktur	
Operasional Integrasi Program Bangga Kencana di Kampung KB	

Pengadaan KIT Siap Nikah
Anti Stunting (DAK
Penugasan)

Operasional Penanganan
Stunting

prioritas	950.784.567		
rutin	380.127.744		
thl/ptt	656.679.000		
tpp	2.046.408.000		
gaji	3.301.172.083		
	7.335.171.394		
DAK FISIK	465.377.399		
DAK PENUGASAN	1.115.000.000		
DAK NON FISIK PPPA	551.910.000		
DAK NON FISIK KB	2.935.415.000	2.939.165.000	(3.750.000)
TOTAL DAK	5.067.702.399		
TOTAL ANGGARAN	12.402.873.793		
	-		
BKP	374.850.000	250.000.000	124.850.000
PPPA	126.412.416		
KS	130.522.151		
KB	144.000.000		
	575.784.567		
	174.215.433	RAKOR	